

DAMPAK PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROSES PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDES) TERHADAP TINGKAT PEMBANGUNAN DI KECAMATAN GERUNG KABUPATEN LOMBOK BARAT

Zaenudin^{1*}, Iwan Harsono², Wahyunadi³

Magister Ilmu Ekonomi, Universitas Mataram, Kota Mataram Indonesia^{1,2,3}

zainhayatimura@gmail.com¹, iwanharsono@unram.ac.id², ghalibwahyu@gmail.com³

ABSTRAK

KATA KUNCI

Dampak Partisipasi Masyarakat;
Proses Penyusunan RKPDes;
Tingkat Pembangunan

KEYWORDS

Impact of Community Participation;
RKPDes Preparation Process;
Development Rate

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan RKPDes terhadap tingkat pembangunan di Kecamatan Gerung. Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif dengan metode eksplanatif. Terdapat tiga jenis informan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu informan utama, informan kunci, dan informan tambahan. Penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian lapangan bahwa tingkat pembangunan yang direncanakan dan telah direalisasikan di desa berkembang yang ada di Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat telah dilaksanakan secara maksimal. Dimana diseluruh desa berkembang yang telah diteliti dapat ditarik kesimpulan, bahwa tingkat pembangunan yang dilakukan cukup pesat dimana ini terlihat dari besarnya anggaran yang telah direalisasikan dalam bidang pembangunan, pesatnya pembangunan yang dilaksanakan sejalan dengan tingginya tingkat partisipasi masyarakat yang ada. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasannya, secara garis besar dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut: (1) Tingkat partisipasi dan pembangunan sangat pesat di masing-masing desa di kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat. (2) Tingkat partisipasi masyarakat sangat pesat dalam proses penyusunan RKPDes di desa berkembang dan maju yang berada di kecamatan Gerung kabupaten Lombok Barat. (3) Tingkat pembangunan sangat pesat dikarenakan tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan program desa di kecamatan Gerung. (4) Tingkat kehadiran masyarakat dan besarnya realisasi anggaran pada bidang pembangunan di 4 (Empat) desa berkembang dan 1 (Satu) desa maju di kecamatan Gerung.

ABSTRACT

The purpose of this research is to determine the impact of community participation in the process of preparing RKPDes on the level of development in Gerung District. This research is included in qualitative research with explanatory methods. There are three types of informants used in this research, namely the main informant, key informant, and additional informant. Determination of informants using purposive sampling techniques. Data collection techniques use observation, in-depth interviews and documentation. Based on the results of field research that the level of development planned and realized in developing villages in Gerung District, West Lombok Regency has been implemented maximally. Where in all developing villages that have been studied, it can be concluded that the level of development carried out is quite rapid where this can be seen from the amount of budget that has been realized in the field of development, the rapid development that is classified in line with the high level of community participation that exists. Based on the results of the analysis and discussion, in general the following conclusions can be drawn: (1) The level of participation and development is very rapid in each village in Gerung District, West Lombok Regency. (2) The level of community participation is very rapid in the process of preparing RKPDes in developing and developed villages located in Gerung sub-district, West Lombok district. (3) The level of development is very rapid due to the high level of community participation in the process of preparing village

programs in Gerung sub-district. (4) The level of community attendance and the amount of budget realization in the field of development in 4 (Four) developing villages and 1 (One) developed village in Gerung sub-district.

PENDAHULUAN

Partisipasi masyarakat merupakan modal utama dalam upaya mencapai sasaran program pemerintah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Keberhasilan dalam pencapaian sasaran pelaksanaan program pembangunan bukan semata-mata didasarkan pada kemampuan aparatur pemerintah, tetapi juga berkaitan dengan upaya mewujudkan kemampuan dan keamanan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan program pembangunan. Adanya partisipasi masyarakat akan mampu mengimbangi keterbatasan biaya dan kemampuan pemerintah dalam pencapaian pelaksanaan program pembangunan tersebut (Lestari & Wahyuningsih, 2021).

Perencanaan pembangunan desa termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) yang disusun setiap enam tahun. RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJMDes dengan jangka waktu 1 tahun yang telah ditetapkan dengan peraturan desa (Wulansari, 2015). Berdasarkan Undang-undang Nomor. 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan bahwa Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya di singkat RKP-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun dan merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada RPJM-Desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa atau disebut sebagai UU Desa merupakan paket regulasi yang timbul dari revisi UU No. 32 Tahun 2004 yang melahirkan 3 Undang-Undang baru antara lain UU Desa itu sendiri, UU tentang Pemerintah Daerah, dan UU tentang Pemilukada. Menurut penjelasan UU Desa, Desa yang memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kukuh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera (Purbasari et al., 2018).

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode eksplanatif. Alasan pendekatan kualitatif karena membahas persoalan sosial bersifat nyata, dinamis dan multidimensional, karena tidak mungkin dapat didekati dengan batasan-batasan yang bersifat eksakta. Moleong (Moleong, 2021) menjelaskan penelitian kualitatif adalah Sedangkan metode eksplanatif menurut Ibrahim (2018) adalah penelitian yang bermaksud menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini tepat digunakan karena membahas persoalan sosial bersifat nyata, dinamis dan multidimensional, karena tidak mungkin dapat didekati dengan batasan-batasan yang bersifat eksakta dijelaskan Kaelan dalam (Ibrahim, 2018). Begitu pula metode yang digunakan yaitu metode eksplanatif karena akan membahas lebih jauh tentang Dampak Partisipasi Masyarakat dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Terhadap Tingkat Pembangunan di Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat.

Penentuan informan pada penelitian ini menggunakan Teknik *purposive sampling*, Adapun rincian informan dalam penelitian ini adalah Informan kunci yaitu pihak Kepala Dinas PMD dan Kecamatan, Informan utama yaitu Kepala Desa, Ketua BPD dan Perangkat Desa, Kader posyandu, KPM (Kader Pemberdayaan Masyarakat), Karang taruna, Ketua RT, dan informan tambahan yaitu Pendamping Lokal Desa dan Pendamping Desa yang berada di wilayah setempat.

Prosedur pengambilan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi

Model analisis data dari penelitian ini menggunakan analisis data model Miles dan Huberman atau model interaktif. Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Aktivitas dalam analisis data model interaktif meliputi: 1) data *collection* (pengumpulan data), 2) data *reduction* (reduksi data), 3) data *display* (penyajian data), dan 4) *conclusion drawing/verification* (menarik kesimpulan).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Partisipasi Masyarakat

Partisipasi aktif dari masyarakat dapat menciptakan arah pembangunan yang lebih baik dan tepat sasaran. Karena yang paling mengetahui bagaimana kondisi suatu wilayah dan apa yang dibutuhkan oleh wilayah tersebut adalah masyarakat itu sendiri. Maka muncullah berbagai program-program pemerintah yang mengikutsertakan masyarakat sebagai stakeholder dalam pembangunan di Indonesia. Partisipasi masyarakat dapat diartikan sebagai bentuk keterlibatan masyarakat yang memiliki tujuan dan kebutuhan yang sama dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupannya. Pengertian partisipasi sendiri sangat beragam. Dalam konteks ini, partisipasi diartikan sebagai keterlibatan masyarakat secara aktif dalam setiap tahapan pembangunan mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Masyarakat tidak lagi menjadi obyek dari pembangunan tetapi menjadi subyek pembangunan, dimana masyarakat berperan dalam menyampaikan aspirasi, menentukan pilihan, memanfaatkan peluang dan menyelesaikan masalahnya. Melalui pendekatan partisipatif ini masyarakat dapat memiliki pengaruh dan kontrol terhadap berbagai inisiatif pembangunan dan pemanfaatan sumberdaya yang akan mempengaruhi kehidupannya maupun lingkungannya. Pembangunan ekonomi selalu ditujukan untuk mempertinggi kesejahteraan.

Jenis-jenis Partisipasi Masyarakat

Huraerah membagi partisipasi ke dalam lima macam, yaitu sebagai berikut: (Huraerah, 2008)

1. Partisipasi langsung dalam kegiatan bersama secara fisik dan tatap muka.
2. Partisipasi dalam bentuk iuran uang atau barang dalam kegiatan partisipatori, dana dan sarana sebaiknya datang dari dalam masyarakat sendiri. Kalaupun terpaksa dari luar hanya bersifat sementara dan sebagai umpan.
3. Partisipasi dalam bentuk dukungan.
4. Partisipasi dalam proses pengambilan keputusan.
5. Partisipasi representative dengan memberikan kepercayaan dan mandata kepada wakil-wakil yang duduk dalam organisasi atau panitia.

Bentuk Partisipasi Masyarakat

- a. *Participation in decision making*, atau partisipasi dalam pengambilang keputusan adalah keikutsertaan masyarakat dalam pembuatan keputusan melalui perencanaan pembangunan. Masyarakat dilibatkan dalam perumusan atau proses pembuatan keputusan dengan mengemukakan pendapat atau saran dalam menilai suatu program atau kebijakan yang akan ditetapkan. Adanya reformasi menyebabkan partisipasi dilaksanakan melalui konsultasi publik dan dialog publik pada proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Dalam konteks peran serta masyarakat yang bersifat kemitraan, pejabat pembuat keputusan dan anggota-anggota masyarakat yang merupakan mitra yang relatif sejajar kedudukannya. Mereka bersama-sama membahas masalah, mencari alternatif pemecah masalah dan pembuat keputusan.
- b. *Participation in implementation*, atau partisipasi dalam pelaksanaan merupakan keikutsertaan masyarakat dalam partisipasi pembangunan yang berwujud kontribusi.

Cohen dan Uphoff (1977) dalam (Mulyadi, 2011) mengemukakan bahwa partisipasi pembangunan dapat dilakukan melalui keikutsertaan masyarakat dalam memberikan kontribusi guna menunjang pelaksanaan pembangunan yang dapat berwujud sebagai berikut:

- c. Kontribusi dengan tenaga, yaitu keikutsertaan seseorang atau kelompok masyarakat dengan terjun langsung dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan. Dalam kehidupan sosial keikutsertaan masyarakat dengan tenaga atau fisik terlihat pada pekerjaan gotong-royong dalam perbaikan jalan, jembatan, sarana ibadah dan pendidikan. Partisipasi masyarakat dengan memberikan kontribusi berupa tenaga merupakan suatu kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka melibatkan masyarakat secara langsung pada program-program pembangunan.
- d. Kontribusi dengan uang, adalah keikutsertaan masyarakat dalam bentuk sumbangan berupa uang. Hal ini biasanya diberikan masyarakat karena masyarakat tidak dapat berpartisipasi langsung terhadap pembangunan. Peranserta masyarakat yang besar akan membawa pengaruh yang besar pula terhadap pembangunan.
- e. Kontribusi dengan bahan (material), merupakan keikutsertaan masyarakat dengan memberikan sumbangan berupa bahan-bahan untuk kegiatan pembangunan fisik. Peran serta masyarakat pada dasarnya merupakan kesediaan secara sukarela dari seseorang untuk membantu kegiatan pembangunan yang berlangsung didaerahnya sesuai dengan kemampuan masing-masing dengan demikian wujud dari partisipasi masyarakat sangat banyak bentuknya.
- f. Partisipasi in benefit, atau partisipasi dalam kemanfaatan merupakan wujud peran dimana dalam keikutsertaan tersebut dapat memberikan manfaat lebih positif bagi pemerintah dan masyarakat.
 - 1) Mengikuti kegiatan pemeliharaan kebersihan rumah dan lingkungan
 - 2) Mengikuti kegiatan keagamaan
 - 3) Mengikuti kegiatan pemeliharaan keamanan lingkungan
 - 4) Mengikuti kegiatan kelompok usaha ekonomi pertahanan daerah dan untuk meningkatkan perekonomian.
- g. Partisipasi in evaluation, atau keikutsertaan dalam evaluasi merupakan keikutsertaan masyarakat dalam mengawasi dan menilai pelaksanaan hasil-hasil perencanaan. Masyarakat dapat memberikan saran dan kritik terhadap pelaksanaan pemerintahan agar sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan mencapai hasil yang telah ditetapkan. Sebagaimana Cohen dan Uphoff (1977) yang mengatakan bahwa masyarakat harus terlibat terhadap penyelenggaraan pembangunan desa, baik yang ditentukan oleh lembaga formal maupun informal, secara langsung maupun tidak langsung dari segenap aktivitas politik maupun publik opinion. Suwignjo (1985) partisipasi dalam evaluasi bertujuan untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya (Kurniawan, 2014).

Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa

Menurut Sherry Arnstein pada makalahnya yang termuat di *Journal of the American Institute of Planners* dengan judul “*A Ladder of Citizen Participation*”, bahwa terdapat 8 tangga tingkat partisipasi berdasarkan kadar kekuatan masyarakat dalam memberikan pengaruh perencanaan (Arnstein, 1969).

Faktor yang Menghambat Partisipasi Masyarakat

Suatu kegiatan memiliki faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan tersebut, sifat-sifat faktor tersebut dapat mendukung keberhasilan suatu program namun dapat menghambat keberhasilan program. Misalnya saja faktor usia, terbatasnya harta benda, pendidikan, pekerjaan dan penghasilan. Seseorang akan berpartisipasi terhadap sesuatu yang

mana dalam hal ini dikonotasikan sebagai suatu perwujudan perilaku seseorang terhadap suatu objek kegiatan. Menurut Herbert dalam Siti Irene Astuti Dwiningrum (2011) bahwa “respons aktor baik langsung maupun tidak, selalu didasarkan atas penilaian atau pemaknaan setiap objek tindakan”. Faktor-faktor yang menghambat partisipasi masyarakat tersebut dapat dibedakan dalam factor internal dan faktor eksternal, dijelaskan sebagai berikut: (Dwiningrum, 2011)

- a. Faktor internal, menurut Slamet (Slamet, 1993), untuk faktor-faktor internal adalah berasal dari dalam kelompok masyarakat sendiri, yaitu individu-individu dan kesatuan kelompok didalamnya. Tingkah laku individu berhubungan erat atau ditentukan oleh ciri-ciri sosiologis seperti umur, jenis kelamin, pengetahuan, pekerjaan dan penghasilan. Secara teoritis, terdapat hubungan antara ciri-ciri individu dengan tingkat partisipasi, seperti usia, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, lamanya menjadi anggota masyarakat, besarnya pendapatan, keterlibatan dalam kegiatan pembangunan akan sangat berpengaruh pada partisipasi.
- b. Faktor Eksternal, menurut Sunarti (Sunarti, 2003), faktor-faktor eksternal ini dapat dikatakan petaruh (*stakeholder*), yaitu Dalam hal ini stakeholder yang mempunyai kepentingan dalam program ini adalah pemerintah daerah, pengurus desa/kelurahan (RT/RW), tokoh masyarakat/adat dan konsultan/fasilitator. Petaruh kunci adalah siapa yang mempunyai pengaruh yang sangat signifikan, atau mempunyai posisi penting guna kesuksesan program. Dalam mempengaruhi partisipasi masyarakat tidak hanya faktor pendukung ada juga factor penghambat dalam partisipasi masyarakat. Menurut Siti Irene Astuti (2011) bahwa faktor yang dapat menghambat atau menjadi ancaman terhadap partisipasi masyarakat adalah: 1) Sifat malas, apatis, masa bodoh, dan tidak mau melakukan perubahan di tingkat anggota masyarakat; 2) Aspek-aspek tipologi (pembuktian dan jurang); 3) Geografis (pulau-pulau kecil yang tersebar letaknya); 4) Demografis (jumlah penduduk); 5) Ekonomi (desa miskin/tertinggal) (Dwiningrum, 2011).

RKP Desa ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa dan disusun melalui forum musrenbang tahunan atau biasa disebut musrenbang Desa. Dokumen RKPDesa kemudian menjadi masukan dalam penyusunan dokumen APB Desa dengan sumber anggaran dari ADD, Pendapatan Asli Desa (PA Desa), swadaya dan partisipasi masyarakat, serta sumber-sumber lainnya yang tidak mengikat. Proses penyusunan dokumen RKP Desa dapat dibagi dalam tiga tahapan, tahapan tersebut adalah: (Halim & Mashur, 2017)

- a. Tahap Persiapan Musrenbang Desa
- b. Tahap Pelaksanaan Musrenbang Desa
- c. Tahap Sosialisasi

Sedangkan langkah-langkah dalam penyusunan dokumen RKP adalah:

- a. Pembentukan dan persiapan Pokja (Tim) Perencanaan Desa
- b. Mereviuw (mengkaji ulang) Dokumen RPJM Desa
- c. Analisis Data Kerawanan Desa
- d. Penyusunan Draft Rancangan Awal RKP Desa
- e. Persiapan Teknis/logistik Musrenban
- f. Pelaksanaan Musrenbang RKP Desa
- g. Rapat kerja Pokja (Tim) Rencana Desa
- h. Penyusunan SK Kades tentang RKP Desa
- i. Sosialisasi

Pengertian Pembangunan Desa

Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Pembangunan desa tidak terlepas dari konteks manajemen pembangunan daerah baik di tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi karena kedudukan desa dalam konteks yang lebih luas (sosial, ekonomi, akses pasar, dan politik) harus melihat keterkaitan antardesa, desa dalam kecamatan, antarkecamatan dan kabupaten dan antar

kabupaten. Pembangunan desa memiliki sebuah peran yang cukup penting dalam proyek pembangunan nasional. Karena pembangunan desa ini cakupannya sangat luas karena merupakan dasar dari sebuah pembangunan. Pembangunan desa ditujukan untuk sebuah peningkatan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat desa. Banyak hal yang harus dilaksanakan dalam hal pembangunan desa itu. Dalam pelaksanaan pembangunan desa seharusnya mengacu pada pencapaian tujuan dari pembangunan yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat pedesaan yang mandiri, maju, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa, Pasal 1 Ayat 9 30 Wahjudin, dalam Nurman, Strategi Pembangunan Daerah, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, Cetakan ke-1, 2015, Hal: 266-267 28 sejahtera, dan berkeadilan. Karena pembangunan desa ini merupakan salah satu agenda besar untuk mengawal implementasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang dilaksanakan secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan dengan jalan fasilitasi, supervisi, dan pendampingan.

Konsep Pembangunan

Pembangunan dapat diartikan sebagai upaya terencana dan terprogram yang dilakukan secara terus menerus oleh suatu Negara untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik. Setiap individu (*society*) atau Negara (*state*) akan selalu bekerja keras untuk melakukan pembangunan demi kelangsungan hidupnya untuk masa ini dan masa yang akan datang. Pembangunan dapat diartikan sebagai upaya terencana dan terprogram yang dilakukan secara terus menerus oleh suatu Negara untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik, dan merupakan proses dinamis untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. proses kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengembangan kegiatan ekonomi dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Tiap-tiap Negara selalu mengejar dengan yang namanya pembangunan. Dengan tujuan semua orang turut mengambil bagian. Sedangkan kemajuan ekonomi adalah suatu komponen esensial dari pembangunan itu, walaupun bukan satu-satunya. Hal ini disebabkan pembangunan itu bukanlah semata-mata fenomena ekonomi (Kurniyati, 2019).

Konsep Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan merupakan suatu usaha yang sistematis dari berbagai pelaku, baik pemerintah swasta, maupun kelompok masyarakat lainnya pada tingkatan yang berbeda untuk menghadapi saling ketergantungan dan keterkaitan aspek- aspek fisik. Sosial ekonomi dan aspek-aspek lingkungan lainnya dengan cara, 1) Terus menerus menganalisis dan pelaksanaan pembangunan, 2) Merumuskan tujuan dan kebijakan pembangunan, 3) Menyusun konsep strategi-strategi pemecahan masalah, 4) Melaksanakannya dengan sumber daya yang tersedia, sehingga peluang-peluang baru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat ditangkap secara berkelanjutan (Sahroni, 2007).

Tujuan Pembangunan Desa

Tujuan dari pembangunan desa di bagi menjadi 2, yaitu pembangunan desa jangka panjang dan pembangunan desa jangka pendek. Tujuan pembangunan jangka panjang yaitu terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa yang secara langsung dilakukan melalui peningkatan kesempatan kerja, kesempatan berusaha dan pendapatan berdasarkan pada pendekatan bina lingkungan, bina usaha, dan bina manusia, dan secara tidak langsung adalah meletakkan dasar-dasar yang kokoh bagi pembangunan nasional. Sedangkan tujuan pembangunan desa jangka pendek yaitu peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi dan dalam pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam.

Gambaran Lokasi Penelitian

Kabupaten Lombok Barat merupakan salah satu dari 10 (Sepuluh) Kabupaten/ Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan luas wilayah 923,06 Km². Secara administrasi Kabupaten Lombok Barat terbagi dalam 10 Kecamatan, yaitu: Kecamatan Sekotong, Kecamatan Lembar, Kecamatan Gerung, Kecamatan Labuapi, Kecamatan Kediri, Kecamatan Kuripan, Kecamatan Narmada, Kecamatan Lingsar, Kecamatan Gunungsari, dan Kecamatan Batulayar

Desa Berkembang

Desa berkembang atau biasa juga disebut dengan desa Madya yakni desa potensial menjadi desa maju, yang memiliki potensi sumber daya social, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan (Sembel et al., 2017).

Desa Berkembang (Desa Madya) adalah Desa yang memiliki sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, akan tetapi belum secara optimal mengelolanya. Desa Berkembang adalah desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan sama dengan 0,7072 dan lebih besar dari 0,5989.

Sesuai dengan pernyataan diatas maka di kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat terdapat 11 desa. Dimana dari 11 (sebelas) desa yang ada terdapat 9 (Sembilan) desa termasuk dalam desa berkembang dan 2 (dua) desa termasuk kedalam desa maju.

Tabel 1

RKPDes dan Realisai Desa Berkembang

NO	DESA	RKPDES 2020	RKPDESA 2021	REALISASI 2021	REALISASI 2022
1.	SUKA MAKMUR	Rp 8.830.785.000	Rp. 4.934.500.000	Rp. 2.138.175.283	Rp. 1.925.802.411
	Bidang Pemerintahan	Rp. 1.950.500.000	Rp. 1.950.500.000	Rp. 800.305.576	Rp. 725.180.535
	Bidang Pembangunan	Rp. 3.778.000.000	Rp. 1.452.000.000	Rp. 279.851.250	Rp. 514.888.398
	Bidang Pembinaan	Rp. 590.500.000	Rp. 339.000.000	Rp. 235.002.450	Rp. 119.742.688
	Bidang Pemberdayaan	Rp. 1.507.000.000	Rp. 383.000.000	Rp. 75.200.000	Rp. 132.223.875
	Bidang Kebencanaan Kedaruratan/Tak Terduga	Rp. 1.350.000.000	Rp. 810.000.000	Rp. 761.400.000	Rp. 450.110.000
2.	GAPUK	Rp. 5.013.433.043	Rp. 2.467.200.000	Rp. 1.778.019.800	Rp 1.723.809.667
	Bidang Pemerintahan	Rp. 263.000.000	Rp. 70.000.000	Rp. 753.099.809	Rp. 714.911.412
	Bidang Pembangunan	Rp. 3.400.033.043	Rp. 1.776.000.000	Rp. 471.396.143	Rp. 399.606.970
	Bidang Pembinaan	Rp. 111.000.000	Rp. 174.200.000	Rp. 129.082.535	Rp. 76.470.057
	Bidang Pemberdayaan	Rp. 1.239.400.000	Rp. 447.000.000	Rp. 30.085.929	Rp. 46.704.000
	Bidang Kebencanaan Kedaruratan/Tak Terduga			Rp. 360.000.000	Rp. 470.800.000
3.	GIRI TEMBESI	Rp 49.314.610.000	Rp 50.878.260.000	Rp 1.874.237.800	Rp 1.601.411.500
	Bidang Pemerintahan	Rp 681.800.000	Rp 2.794.300.000	Rp. 703.019.868	Rp. 635.399.697
	Bidang Pembangunan	Rp 44.450.000.000	Rp. 45.859.500.000	Rp. 486.883.000	Rp. 284.144.000
	Bidang Pembinaan	Rp 3.266.060.000	Rp. 3.112.700.000	Rp. 0	Rp. 60.825.000
	Bidang Pemberdayaan	Rp 916.750.000	Rp. 926.750.000	Rp. 7.293.000	Rp. 192.113.000
	Bidang Kebencanaan Kedaruratan/Tak Terduga		Rp. 185.010.000	Rp. 680.400.000	Rp. 441.200.000
4	TAMAN AYU	Rp. 32.880.278.000	Rp. 38.009.478.000	Rp. 2.272.472.561	Rp 2.358.378.250
	Bidang Pemerintahan	Rp. 1.175.778.000	Rp. 2.140.378.000	Rp. 829.319.074	Rp. 872.362.234
	Bidang Pembangunan	Rp. 3.171.500.000	Rp. 38.009.478.000	Rp. 487.536.050	Rp. 554.641.296
	Bidang Pembinaan	Rp. 126.000.000	Rp. 140.000.000	Rp. 207.739.438	Rp. 88.929.000
	Bidang Pemberdayaan	Rp. 28.407.000.000	Rp. 2.449.400.000	Rp. 596.911.400	Rp. 115.243.6.00
	Bidang Kebencanaan Kedaruratan/Tak Terduga		Rp. 1.331.600.000	Rp. 150.966.600	Rp. 726.202.120

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa tingkat pembangunan yang direncanakan dan telah direalisasikan di desa berkembang yang ada di Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat telah dilaksanakan secara maksimsl. Dimana diseluruh desa berkembang yang telah diteliti dapat ditarik kesimpulan, bahwa tingkat pembangunan yang dilakukan cukup pesat dimana ini terlihat dari besarnya anggaran yang telah direalisasikan dalam bidang pembangunan

Tingginya pembangunan yang dilaksanakakan sejalan dengan tingginya tingkat partisipasi masyarakat yang ada. Karena dengan semakin pesat tingkat pembangunan yang dilaksanakan maka proses perencanaan yang dilaksanakan sudah maksimal. Proses perencanaan program yang sangat matang menentukan hasil yang sangat baik pula dalam sebuah program desa.

Disini sangat jelas bahwa tingkat partisipasi masyarakat yang ada di Desa berkembang sudah cukup tinggi. Ini dapat dilihat dari tingkat pembangunan dari seluruh desa yang ada. Seperti desa Suka Makmur dalam perencanaan program desa RKPDes 2020 menganggarkan Rp. 3.778.000.000 dan RKPDes 2021 menganggarkan Rp. 1.452.000.000 untuk bidang pembangunan. Dan untuk realisasi angaran untuk tahun 2021 sebesar Rp. 279.851.250 dan realisai anggaran untuk tahun 2022 sebesar Rp 514.888.398 untuk bidang pembangunan.

Secara garis besar partisipasi masyarakat dalam penyusunan RKPDes dalam pembangunan di desa Suka Makmur sudah dilaksanakan secara maksimal, dan tingkat partisipasi masyarakat dalam penyusunan RKPDes sangat tinggi. Sesuai dengan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti juga sesuai dengan hasil Berita Acara RKPDes tahun 2022 dan DU RKPDes tahun anggaran 2023 desa Suka Makmur, dimana partisipasi masyarakat yang hadir sangat baik dimana peserta yang hadir berjumlah 34 orang yang terdiri dari berbagai unsur masyarakat baik dari pemerintah desa, ketua dan anggota BPD, kader posyandu dan Kader Pemberdayaan Masyaerakatr, pekasih, ketua Rt dan karang taruna.

Untuk desa Gapuk RKPDes tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp 3.400.033.043 dan RKPDes 2021 sebesar Rp 1.776.000.000 untuk pembangunan. Sedangkan untuk realisai bidang pembangunan tahun 2021 sebesar Rp. 471.396.143, dan tahun 2022 sebesar Rp. 399.606.970. Disini jelas bahwa tingkat pembanangunan sangat tinggi karena jumlah anggaran yang di alokasikan cukup besar, anggaran untuk pembangunan desa berada di dabawah bidang pemerintahan desa karena di bidang pemerintahan desa anggaran yang dikeluarkan cukup besar dikarenakan termasuk dalam operasional kantor dan gaji pegawai selama satu tahun.

Untuk desa Giri Tembesi RKPDes tahun 2020 anggaran sebesar Rp. 44.450.000.000, dan RKPDes tahun 2021 sebesar Rp. 45.859.500.000 untuk bidang pembangunan. Dan realisai anggaran tahun 2021 sebesar, Rp. 486.883.000 dan realisasi anggaran tahun 2022 sebesar Rp 284.144.000 untuk bidang pembangunan. Dari proses perencanaan program sampai tahap realisasi jelas terlihat dalam tabel diatas bahwa anggaran bidang pembangunan yang paling besar direalisasikan. Tingginya anggaran bidang pembangunan ini juga dapat disimpulkan menjadi tinggi tingkat partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana program desa yang bertujuan untuk meningkatkan tingkat pemangunan yang ada di desa Giri Tembesi.

RKPDes tahun 2021 desa Taman Ayu Bidang Pembangunan sebesar Rp 3.171.500.000, dan RKPDes tahun 2021 sebesar Rp 38.009.478.000. realisai anggaran tahun 2021 sebesar Rp 487.536.050, dan realisai anggaran tahun 2022 sebesar Rp 554.641.296 untuk bidang pembangunan. Di sini dapat ditarik kesimpulan bahwa angaran yang direncanakan dalam proses RKPDes dan realisai anggaran cukup besar untuk bidang pembangunan, ini menunjukkan tingkat pembangunan yang ada di desa Taman Ayu cukup besar. Anggaran yang paling besar direalisasikan yakni bidang pemerintahan, dengan realisasi anggaran tahun2021 sebesar Rp 829.319.074, dan realisasi anggaran tahun 2022 sebesar Rp 872.362.234 di bidang pemerintahan desa anggaran yang dikeluarkan cukup besar dikarenakan termasuk dalam operasional kantor dan gaji pegawai selama satu tahun. Selain itu realisasi anggaran yang cukup besar juga direalisasikan pada tahun 2021 di bidang pemberdayaan masyarakat yakni sebesar Rp. 596.911.400 dan Rp. 115.243.6.00 dan realisai anggaran tahun 2022 Bidang Kebencanaan Kedaruratan/Tak Terduga Rp. 726.202.120.

Desa Maju

Desa Maju atau bisa juga disebut sebagai Desa Pra Sembada adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan. Sejalan dengan tujuan dari desa maju ini maka desa Beleke sudah mencapai tujuan dari desa maju tersebut sesuai dengan Indeks Desa Membangun. Karena tingkat pembangunan di desa maju sudah dikatakan cukup tinggi sehingga fokus pelaksanaan dan perencanaan program desa pada kesejahteraan masyarakat.

Tabel 1
RKPDes dan Realisasi Anggaran Desa Beleke

NO	DESA	RKPDES 2020	RKPDESA 2021	REALISASI 2021	REALISASI 2022
1.	BELEKE	Rp 2.638.770.586	Rp 3.268.078.498	Rp 2,313,210,414	Rp 2,179,636,147
	Bidang Pemerintahan	Rp 884.322.420	Rp 986.471.250	Rp 629,120,733	Rp 826,912,060
	Bidang Pembangunan	Rp 1.188.422.963	Rp 1.338.571.348	Rp 677,191,303	Rp 236,869,650
	Bidang Pembinaan	Rp 188.053.855	Rp 195.019.450	Rp 124,675,000	Rp 164,380,000
	Bidang Pemberdayaan	Rp 181.407.450	Rp 193.016.450	Rp 0	Rp 12,779,200
	Bidang Kebencanaan Kedaruratan/Tak Terduga	Rp 46.563.898	Rp 505.000.000	Rp 915,094,500	Rp 968,400,000

Dari tabel diatas jelas digambarkan bahwa tingkat pembangunan di desa Beleke cukup pesat. Ini dapat dilihat dari RKPDes tahun 2020 Bidang Pembangunan sebesar Rp 1.188.422.963, dan RKPDes tahun 2021 sebesar Rp. 1.338.571.348 untuk bidang pembangunan. Sedangkan realisasi anggaran tahun 2021 sebesar Rp. 677,191,303, dan realisasi anggaran tahun 2022 Rp. 236,869,650 untuk bidang pembangunan. Tingginya tingkat pembangunan yang ada juga sejalan dengan tingginya tingkat kesejahteraan masyarakat.

Tingginya tingkat kesejahteraan masyarakat ini sesuai dengan tujuan dari desa Maju, dimana desa Beleke merealisasikan anggaran pada tahun 2021 sebesar Rp 915,094,500, dan pada tahun 2022 sebesar Rp 968,400,000 Bidang Kebencanaan Kedaruratan/Tak Terduga. Dimana dalam bidang Kebencanaan Kedaruratan/Tak Terduga terdapat anggaran yang di berikan kepada masyarat yang berbentuk Bantuan Langsung Tunai. Dimna bantuan ini dapat diharapkan membantu kesejahteraan masyarakat, terlebih lagi masyarakat miskin yang sedang mengalami masa sulit dari keterpurukan ekonomi akibat pandemie Covid-19.

KESIMPULAN

Tingkat partisipasi masyarakat yang berada di Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat telah dilaksanakan secara maksimsl. Dimana diseluruh desa berkembang yang telah diteliti dapat ditarik kesimpulan, bahwa tingkat pembangunan yang dilakukan cukup pesat dimana ini terlihat dari besarnya anggaran yang telah direalisasikan dalam bidang pembangunan. Pesatnya pembangunan yang dilaskanakan sejalan dengan tingginya tingkat partisipasi masyarakat yang ada. Karena dengan semakin pesatnya tingkat pembangunan yang dilaksanakan maka proses perencanaan yang dilaksanakan sudah maksimal. Proses perencanaan program yang sangat matang menentukan hasil yang sangat baik pula dalam sebuah program desa. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasannya, secara garis besar dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut: 1) Tingkat partisipasi dan pembangunan sangat pesat di masing-masing desa di kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat. 2) Tingkat partisipasi masyarakat sangat pesat dalam proses

penyusunan RKPDes di desa berkembang dan maju yang berada di kecamatan Gerung kabupaten Lombok Barat. 3) Tingkat pembangunan sangat pesat dikarenakan tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan program desa di kecamatan Gerung. 4) Tingkat kehadiran masyarakat dan tingginya realisasi anggaran pada bidang pambangunan di 4 (Empat) desa berkembang dan 1 (Satu) desa maju di kecamatan Gerung.

DAFTAR PUSTAKA

- Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216–224. [Google Scholar](#)
- Dwiningrum, S. I. A. (2011). *Desentralisasi dan partisipasi masyarakat dalam pendidikan*. Pustaka Pelajar. [Google Scholar](#)
- Halim, A., & Mashur, D. (2017). Implementasi Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Dalam Bidang Pembangunan Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 4(2), 1–15. [Google Scholar](#)
- Huraerah, A. (2008). *Pengorganisasian dan pengembangan masyarakat: model dan strategi pembangunan berbasis kerakyatan*. Humaniora. [Google Scholar](#)
- Ibrahim, I. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Panduan Penelitian beserta Contoh Proposal Kualitatif* (2nd ed.). Alfabeta. [Google Scholar](#)
- Kurniawan, M. H. (2014). Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan (Studi Kasus Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PIIP) di Desa Kampung Baru Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk). *Publika*, 2(3). [Google Scholar](#)
- Kurniyati, Y. (2019). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Di Desa Mulyorejo 1 Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara* [Skripsi]. UIN Raden Intan Lampung. [Google Scholar](#)
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya. [Google Scholar](#)
- Lestari, S. M., & Wahyuningsih, Y. E. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDES). *Jurnal Sosial Sains*, 1(10), 1254–1261. [Google Scholar](#)
- Mulyadi, M. (2011). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Masyarakat Desa*. Pustaka Nadi. [Google Scholar](#)
- Purbasari, H., Wardana, B. W., & Pangestu, I. A. (2018). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Alokasi Dana Desa Dan Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Terhadap Belanja Desa Bidang Pekerjaan Umum Dan Pertanian (Studi Empiris di Seluruh Desa Se-Kabupaten Sukoharjo). *Prosiding University Research Colloquium*, 281–288. [Google Scholar](#)
- Sahroni, D. (2007). *Perencanaan Pembangunan Daerah*. GTZ-Usaid, Jakarta. [Google Scholar](#)

- Sembel, T., Gosal, R., & Pangemanan, S. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Studi di Desa Singsingon Barat Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow). *Jurnal Eksekutif*, 1(1). [Google Scholar](#)
- Slamet, Y. (1993). *Pembangunan masyarakat berwawasan partisipasi*. Sebelas Maret University Press. [Google Scholar](#)
- Sunarti, S. (2003). Partisipasi masyarakat dalam pembangunan perumahan secara berkelompok. *Jurnal Tata Loka*, 5(1). [Google Scholar](#)
- Wulansari, T. A. (2015). Peran Masyarakat Desa Landungsari Kabupaten Malang Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) TAHUN 2013-2019. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (JISIP)*, 4(3). [Google Scholar](#)

Copyright holders:

Zainudin, Iwan Harsono, Wahyudi (2023)

First publication right:

Hawalah – Kajian Ilmu Manajemen, Ekonomi dan Bisnis



This article is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International](#)